

# LAPORAN KINERJA (LK)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2024



## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA**

Jln. Besar Lima Puluh Simp. Dolok Km. 8 Pulau Sejuk  
Kecamatan Datuk Lima Puluh  
Telp/Fax (0622) 96375–Kode Pos 21255



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara selaku pelaksana dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menyusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2024, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Batu Bara, yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 - 2026.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini untuk masa yang akan datang.

Datuk Lima Puluh, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BATU BARA



RENULIA SMARA, AP., SH., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640324 198803 1 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Isu-isu Strategis .....	4
D. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.....	5
E. Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ...</b>	<b>7</b>
A. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.....	7
B. Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	20
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>21</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 - 2026.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara;
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan kredibilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah / Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

## C. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara sebagai Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Batu Bara antara lain :

1. Menurunnya rasa satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat;
2. Seringnya terjadi konflik antar nelayan di perairan Kabupaten Batu Bara;
3. Antisipasi terhadap berkembangnya organisasi terlarang di masyarakat;
4. Menurunnya peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi termasuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan sosialisasi;
5. Pengaruh Budaya asing yang mengakibatkan pergeseran budaya asli dan berdampak negatif bagi budaya lokal. Hal ini diakibatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat;



6. Peran LSM/ORMAS dalam pembangunan sangatlah baik, maka dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan secara berkala untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

#### **D. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara adalah membantu Bupati Batu Bara dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

### **Bab I - PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II - PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

### **Bab III - AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara selama Tahun 2024 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

### **Bab IV - PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024.

#### A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

##### 1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara adalah dengan melakukan pengkoordinasian perumusan



kebijakan, penyelenggaraan administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## 2. Kebijakan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dalam Arah Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan ditujukan pada kelancaran penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, penataan aparatur, pengelolaan keuangan dan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan aparatur terkait. Kebijakan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- 2) Menampung setiap informasi berkaitan dengan potensi konflik yang kemudian ditangani sehingga konflik tidak terjadi.
- 3) Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kabupaten Batu Bara.
- 4) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang kehidupan politik demokratis.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana.



**Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

<b>VISI : KABUPATEN BATU BARA SEBAGAI DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA PERTANIAN YANG BERIMAN, MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA BERJAYA</b>			
<b>MISI Ke-2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b><u>Tujuan 1</u></b> Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	<b><u>Sasaran 1.1</u></b> Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	<b><u>Strategi 1.1</u></b> Melakukan pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat  <b><u>Strategi 1.2</u></b> Memberdayakan Peran Tim Terpadu Penanganan Koflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Pemantau Perkembangan Politik, serta Parpol di Kabupaten Batu Bara untuk deteksi secara dini terhadap gejolak sosial, politik, ketertiban dan keamanan	<b><u>Kebijakan 1.1</u></b> Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan  <b><u>Kebijakan 1.2</u></b> Menampung setiap informasi berkaitan dengan potensi konflik yang kemudian ditangani sehingga konflik tidak terjadi
<b><u>Tujuan 1</u></b> Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	<b><u>Sasaran 1.1</u></b> Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	<b><u>Strategi 1.1</u></b> Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	<b><u>Kebijakan 1.1</u></b> Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kab. Batu Bara



	<p><b>Sasaran 2.1</b> Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat</p>	<p><b>Strategi 1.2</b> Melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis</p> <p><b>Strategi 2.1</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara</p>	<p><b>Kebijakan 1.2</b> Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang kehidupan politik demokratis</p> <p><b>Kebijakan 2.1</b> Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana</p>
--	--	---	--

## B. PERJANJIAN KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	Persentase	100
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pileg dan Pilkades	Persentase	73
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan terverifikasi	Persentase	75



3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB (74,00)

Untuk mendukung tercapainya target kinerja, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program kerja beserta anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2024, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3. Program dan Anggaran Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,259,912,469	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	989,741,705	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	46,170,533,433	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	323,515,000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	912,236,400	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,486,726,320	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>53,142,665,327</b>	<b>APBD</b>



Adapun faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara, antara lain :

1. Penanganan Konflik Sosial di wilayah Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Batu Bara.
2. Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kabupaten dan kecamatan.
3. Peningkatan Kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Batu Bara
4. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Batu Bara.
5. Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Batu Bara.
6. Peringatan Hari Lahir Pancasila.
7. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
8. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
9. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
10. Pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Batu Bara
11. Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Kabupaten Batu Bara.

Sedangkan faktor-faktor penghambat untuk mencapai target kinerja, antara lain :

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
2. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan, sehingga belum optimalnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi konflik yang terjadi di tingkat desa/kelurahan.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2024 diuraikan berdasarkan sasaran, sebagai berikut :



**Sasaran 1:**

**Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	Persentase	100	100	100

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, dapat diuraikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 5 (lima) potensi konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara, antara lain :

1. Permasalahan Agraria/Pertanahan

- Tanah Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) belum ada tindakan yang jelas antara Betahamu pimpinan Maju Situmorang dengan Kelompok Tani yang dipimpin oleh Wasinton Sibuea.
- Objek Tanah berada di Wilayah Kab. Batu Bara namun masyarakat yang berada disana merupakan masyarakat ber KTP Kab. Asahan
- Karena keterbatasan kepolisian dalam Undang-undang untuk menangani masalah lahan Puskopad diharapkan dalam penyelesaiannya mengikutsertakan Polisi Militer untuk penyelesaiannya.

## 2. Permasalahan BBM (Solar)

- Masyarakat nelayan di pesisir tidak bisa mendapatkan Bahan Bakar Solar dari SPBU dikarenakan :
  - 1) Jumlah kuota yang tidak mencukupi di wilayah Kab. Batu Bara
  - 2) Harus melengkapi Persyaratan rekomendasi untuk mengambil minyak solar
- Diharapkan untuk permohonan penambahan kuota Bahan Bakar Solar agar tercapainya kebutuhan nelayan untuk bahan bakar kapal.

## 3. Permasalahan Pungutan Liar

- Banyak masyarakat mengeluh pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang terjadi di Kuala Tanjung dan Tanjung Tiram
- Masyarakat yang resah diharapkan melaporkan ke Babinsa atau Babinkamtibmas dan meneruskan ke Polsek untuk segera di tindaklanjuti agar ada efek jera.

## 4. Konflik antara Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus dengan PT. Perkebunan Socfindo Tanah Gambus.

- Adanya klaim dari Kelompok Tani Perjuangan Desa Simpang Gambus yang dipimpin oleh an. Ruslan mengklaim bahwa telah terjadi kelebihan HGU PT. Socfindo Tanah Gambus sebanyak 667 Ha. Kelebihan HGU tersebut menurut Kelompok Tani terjadi di Desa Simpang Gambus sebanyak 472 Ha. di Desa Perkebunan Lima Puluh. Kelompok Tani Desa Perjuangan Simpang Gambus meminta kepada DPRD Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar pada saat perpanjangan HGU PT. Socfindo menurut Kelompok Tani tidak lagi dimasukkan ke dalam HGU.

5. Tingginya angka pemakaian narkoba di kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara dari kalangan dewasa hingga remaja.
- Akibat tingginya penggunaan narkoba bisa memicu tingginya tingkat kriminalitas dan tingkat pencurian yang relatif lebih besar di Kabupaten Batu Bara.
  - BNN Kabupaten Batu Bara melakukan rehabilitasi untuk masyarakat yang sudah terkena narkoba.
  - Polres sudah melakukan pemberantasan narkoba yang datang dari luar Kabupaten Batu Bara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab Batu Bara, Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kab. Batu Bara, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Batu Bara, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Batu Bara beserta Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara secara bersama-sama melakukan penanganan terhadap potensi konflik yang muncul di wilayah Kabupaten Batu Bara, khususnya penanganan terhadap informasi potensi konflik secara cepat dan tepat.

Hasil yang kami peroleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah potensi konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah potensi konflik}} \times 100 \\ &= \frac{5}{5} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$



**Sasaran 2 :**

**Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945**



Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pileg dan Pilkadaes	Persentase	73	77,76	106,52
Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan terverifikasi	Persentase	75	78	104

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, dapat diuraikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada indikator yang pertama, dari target 73 persen persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, dan Pileg 77,76 persen. Hal tersebut telah memenuhi 106,52 persen dari target yang telah ditetapkan.
2. Pada indikator kedua, persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan terverifikasi sampai tahun 2024 adalah 78 persen. Hal tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 75 persen, sehingga capaian target kinerja Tahun 2024 mencapai 104 persen. Pada tahun 2024, Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dan di Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) berjumlah 30 Ormas. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang berjumlah 18 Ormas.



**Sasaran 3 :**

**Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	92,69	109,04

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara melalui aplikasi si Sukma terhadap pelayanan-pelayanan sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Keterangan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan keberadaannya di Kabupaten Batu Bara.
2. Penerbitan Surat Rekomendasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
3. Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi mahasiswa atau kelompok kerja lainnya.

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 3 (tiga) pelayanan di atas dengan nilai 92,69 dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai 85 dengan predikat Baik.



**Sasaran 4 :**

**Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB (74,00)	BB (75,8)	102,43

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara memperoleh nilai BB (75,8) dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai BB (74,00).

Berikut disampaikan tabel capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.



**Tabel 5. Capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)							
1	Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	Persentase penanganan potensikonflik agar tidak menjadi konflik	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes	73%	-	73%	73,5%	74%	77,76%	-	-	106,52%	-	-
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan Terverifikasi	75%	-	75%	77%	80%	78%	-	-	104%	-	-
3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85,50	86	92,69	-	-	109,04%	-	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	-	BB (74,0)	BB	BB	BB (75,8)	-	-	102,43%	-	-



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai.
3. Kerjasama dengan perangkat daerah lainnya, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
2. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal.
3. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
4. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan, sehingga belum optimalnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi konflik yang terjadi di tingkat desa/kelurahan.

Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	Persen	100	100	100.00	3,388,704,425.00	3,056,061,675.00	90.18	0.99
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes	Persen	73	77.76	106.52	46,170,533,433.00	45,997,397,736.00	99.63	1.06
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan Terverifikasi	Persen	75	78	104.00	323,515,000.00	317,248,578.00	98.06	1.03
Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	92.69	109.05	1,121,384,661.00	926,382,941.00	82.61	1.08
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	74	75.8	102.43	2,138,527,808.00	1,964,022,035.00	91.84	1.02



Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa anggaran dapat dikelola dengan baik dan pelaksanaan program sudah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun indikator persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik ditunjang dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh bidang Kesatuan Bangsa.

Indikator Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes ditunjang dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan terverifikasi ditunjang dengan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.

## B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dan realisasinya pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.223.592.308,00	2.039.442.035,00	184.150.273,00
2	Belanja Hibah	47.292.300.834,00	47.042.300.827,00	250.000.007,00
3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa	3.521.172.185,00	3.074.735.103,00	446.437.082,00
5	Belanja Modal	105.600.000,00	104.635.000,00	965.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>53.142.665.327,00</b>	<b>52.261.112.965,00</b>	<b>881.552.362,00</b>



## BAB IV

### PENUTUP

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam tiga tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara tahun 2024 - 2026, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas - tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara Tahun 2024 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang direncanakan, sebagian besar berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Pada umumnya kinerja yang tidak mencapai dari target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.



Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala / permasalahan. Permasalahan / kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Datuk Lima Puluh, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BATU BARA



RENGLI RASMARA, AP., SH., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640324 198803 1 005

